

**STRATEGI POLITIK H.SYARIFUDDIN DALAM PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF 2024 DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

SKRIPSI



RAHMAT

F0120503

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI POLITIK H.SYARIFUDDIN DALAM
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI
PROVINSI SULAWESI BARAT
NAMA : RAHMAT
NIM : F0120503
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

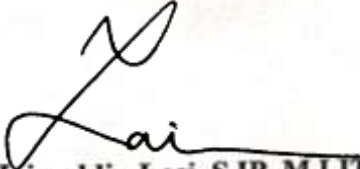
Telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan pada seminar hasil skripsi.

Majene, 9 mei 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Zainuddin Losi, S.IP, M.LITT
NIP : 199201262018032001


Budi Prayctno, S.Fil.L., M.Ag.
NIP : 19920907202201010

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd
NIP : 197001311998021005

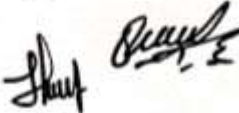
SKRIPSI
STRATEGI POLITIK H.SYARIFUDDIN DALAM PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF 2024 DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

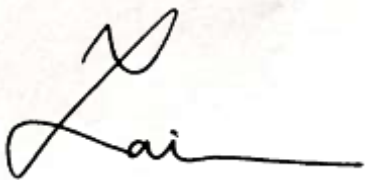
RAHMAT
F0120503

Telah diijinkan didepan Dewan Penguji
pada tanggal, 9 mei 2025, dan dinyatakan **LULUS**

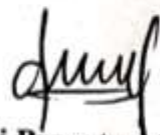
Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Aco Nata Saputra, SLP, M.Si	Ketua Penguji	
2. Rahmatullah, S.Sos., M.Si	Penguji Utama	
3. Hendrawan, S.IP, M.A.P	Penguji/Anggota	

Pembimbing 1


Zainuddin Losi, S.IP, M.LITT
NIP : 199201262018032001

Pembimbing 2


Budi Prayetno S.Fil.I., M.Ag.
NIP : 19920907202201010

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat

NIM : F01 20 503

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dari usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar sarjana yang telah saya peroleh dan di ajukan ke muka hukum.

Majene, ..14 MEI 2024


10000
METERAI
TEMPEL
C2598AMX359019223
Rahmat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau parlemen diadakan di Indonesia setiap lima tahun sekali. Demokrasi menghasilkan masyarakat yang lebih cerdas dan perlu memahami situasi politik di Indonesia. Dalam demokrasi ini, rakyat juga mempunyai kewajiban untuk memilih pemimpin yang dapat dipercaya untuk menjalankan tugasnya. Dalam pemilu, tidak ada perbedaan antara agama, budaya, atau bahasa (Mukuan, 2020). Perwujudan demokrasi di Indonesia dicapai melalui pemilihan umum parlemen secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk melepaskan haknya untuk memilih orang-orang yang mereka percayai untuk bertugas di lembaga-lembaga negara yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab penuh. Sebagai instrumen kampanye politik, calon anggota parlemen tentu tidak bisa bertindak sendiri tentu saja, memenangkan kampanye memerlukan strategi dan alat. Oleh karena itu, partai politik adalah wadah bagi orang-orang yang memiliki potensi kepemimpinan dan kewarganegaraan. Indonesia memiliki 38 Provinsi dengan 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum di 2024 (Benni, 2019).

Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi Indonesia, dimana rakyat akan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berbagai isu dan dinamika mewarnai persiapan pemilu ini, dalam pemilu 2024 secara demografi yang mendominasi adalah generasi muda sebanyak 55% Gen Z dan milenial yang membawa perubahan preferensi dan isu politik. Isu-isu utama dalam pemilu 2024 ini

seperti ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, dan anti korupsi (Asfar, dkk, 2024). Pemilu 2024 mendatang menjadi perhelatan elektoral yang penting untuk dicermati. Bukan saja karena momen itu menjadi sejarah pertama dalam lanskap perjalanan demokrasi elektoral Indonesia yang mana semua jabatan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan dipilih serentak dalam tahun yang sama (Sutisna, 2023).

Pemilihan umum yang sering di singkat sebagai PEMILU, adalah proses demokrasi dimana warga negara memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam suatu demokrasi karena melalui proses inilah rakyat berpastipasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan negara. Pemilihan umum (Pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat pada tahun 2024 memiliki jumlah kursi 45 orang yang dipilih setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Barat terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Situasi politik seperti ini merupakan momentum bagi masyarakat Sulawesi Barat. Momentum pada pemilihan umum ini untuk mengubah nasib rakyat sebagai pemilih calon legislatif yang berkontestasi pada pemilihan umum 2024 (Albana, 2023). Dalam kontestasi pemilu para calon akan menggunakan strategi politiknya masing-masing dalam memenangkan pemilu tersebut. Strategi politik adalah strategi yang digunakan dalam merealisasikan cita-cita politik. Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan, yakni kemenangan (Schorder, 2004).

Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Barat dimulai pada tahun 2004 setelah pemekaran Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat memiliki daratan dengan luas 16.937,16 km² dengan sebanyak 69 kecamatan

di kelurahan/desa. Karena kondisi geografi Provinsi Sulawesi Barat yang luas, mengharuskan adanya pemetaan daerah-daerah pemilihan dalam pemilihan umum legislative.

Berdasarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 memutuskan terdapat 7 daerah pemilihan yaitu Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 meliputi Kabupaten Mamasa dengan alokasi 3 6 kursi, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 meliputi Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Polewali, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapango, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Matakali, dan Kecamatan Bulu dengan alokasi kursi 8 orang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 meliputi Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tinambung, Kecamatan Tutar, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Limboro, Kecamatan Balanipa, dan Kecamatan Allu dengan alokasi kursi 7 orang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 meliputi Kabupaten Majene dengan alokasi kursi 5 orang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 meliputi Kabupaten Mamuju dengan alokasi kursi 9 orang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 meliputi Kabupaten Mamuju Tengah dengan alokasi kursi 4 orang, dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7 meliputi Kabupaten Mamuju Utara dengan alokasi kursi 6 orang. Total alokasi kursi terisi 45 orang.

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun 2024 terisi 45 kursi pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2024, Para calon akan menggunakan strategi politik mereka masing-masing untuk memenangkan kontestasi pemilu. Strategi yang digunakan untuk mencapai cita-cita politik dikenal sebagai strategi politik. Strategi politik adalah strategi yang digunakan dalam merealisasikan cita-cita politik. Strategi itu sendiri selalu mengejar kemenangan. Setiap calon memiliki strategi politik yang berbeda.

H. Syarifudin merupakan anggota DPRD Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 berasal dari fraksi Gerindra menggunakan strategi politik untuk mempertahankan suara selama satu periode. Popularitas dan elektabilitas H. Syarifuddin menjadi faktor terpenting yang menentukan peluangnya terpilih kembali menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat. Popularitas merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap H. Syarifuddin.

H. Syarifuddin merupakan pengusaha ulung di Makassar tepatnya di Pelabuhan Paotere, beliau mencalonkan anggota DPRD Sulawesi Barat di pemilihan legislatif dari partai Gerindra. Beliau merupakan tokoh terkemuka dan memiliki banyak simpatisan di Kabupaten Polewali Mandar. Sebelum terpilih kembali pada pemilu 2024 untuk periode 2024-2029, beliau pernah menduduki kursi anggota DPRD Sulawesi Barat pada periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebesar 5.456 suara. Kinerja H. Syarifuddin Gerindra selaku Anggota DPRD Sulawesi Barat H. Syarifuddin Gerindra dikenal sebagai anggota DPRD yang aktif dan berprestasi. Beliau banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, hal ini dikarenakan beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2019 hingga tahun

2024 yaitu pembangunan infrastruktur, pengadaan pertanian dan perkebunan, koperasi, dan kelompok usaha bersama. Program yang diwujudkan oleh H. Syarifuddin ini sebagai bentuk realisasi sebagai perwakilan rakyat dalam mensejahterakan masyarakat di daerah pilihannya yaitu Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 meliputi 7 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu Kecamatan Allu, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Limboro, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tinambung, dan Kecamatan Tutar (Bakri, 2024)

(Menurut Yusri 2016) menyebut bahwa keberhasilan calon legislatif merebut hati para pemilih tidak terlepas dari lamanya seorang caleg itu berkecimpung di dunia politik. Calon Legislatif (Caleg) senior tentu memiliki pengalaman yang lebih dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena sosoknya telah dikenal sehingga mereka lebih mudah menang dalam Pemilu legislatif. Seorang caleg dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menumbuhkan *image* yang positif bagi dirinya maupun bagi partai politik. Febriansyah, dkk (2018) menyebutkan Partai politik sebagai salah satu media yang digunakan untuk menampung aspirasi rakyat, menjadi komponen utama penting dalam rangka mendongkrak pemilih pada pesta demokrasi di Indonesia. Budiarjo (2010) juga menjelaskan bahwa partai politik merupakan salah satu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi dan tujuan yang sama, dimana tujuan kelompok ini untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

H. Syarifuddin merupakan calon legislatif dari Partai Gerindra. Partai Gerindra merupakan partai politik yang cukup besar dan mempunyai pengaruh di

Sulawesi Barat. Berbagai prestasi berhasil diraih oleh Bapak H. Syarifuddin selama periode 2019-2024 dan berhasil mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat di daerah pemilihan Sulawesi Barat 3, Kabupaten Polewali Mandar kembali dilantik menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat 2024-2029 juga akan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap catatan kinerja 2019-2024.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh H.Syarifuddin *incumbent* dalam pemilu 2024 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji strategi terpilihnya kembali H.Syarifuddin pada Pemilihan umum legislatif tahun 2024. Dengan itu penulis memutuskan memilih judul “Strategi Politik H.Syarifuddin Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 Di Provinsi Sulawesi Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, Maka penulis dapat Menguraikan Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini. Adapun Rumusan Masalah Pada Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana strategi politik H.Syarifuddin dalam pemilu legislatif Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi H.Syarifuddin dalam menjalankan strategi politik pada pemilu legislatif Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk strategi kemenangan H.Syarifuddin dalam pemilu legislatif Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami H.Syarifuddin dalam menjalankan strategi politik pada pemilu legislatif Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini. Diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu politik sehingga dapat menjadi rujukan atau sebagai literatur yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik mengenai perilaku pemilih pada pemilu 2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan terkhusus mengenai perilaku pemilih.
- b. Pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perilaku pemilih
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori adalah gambaran singkat tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Gambaran ini menjelaskan tentang konsep-konsep yang ada dalam teori, hubungan antar konsep, dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Landasan teori memberikan landasan berpikir bagi peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti dan menarik kesimpulan. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah, Strategi Politik dan Aktor Politik.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil analisis yang dilakukan:

1. Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto, Ratnia Solihah. “Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang strategi dalam pemanfaatan modal politik dan modal sosial salah satu aktor politik untuk mempertahankan kekuasaan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Kedua modalitas ini menjadi suatu kekuatan yang wajib dimiliki oleh para aktor politik saat hendak bersaing dalam kontestasi politik. Karena modalitas politik yang diusung oleh para aktor politik berupa

modal politik dan modal sosial sangat efektif memenangkan kontestasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bagi para calon kandidat atau kontestan yang sama sekali tidak mempunyai kesiapan kedua basic tersebut tidak akan mampu bersaing di arena politik. Sehingga, apabila tidak ingin kalah dalam pertarungan politik dengan kontestan lainnya maka, para calon kandidat yang sudah terpilih harus mempunyai modal politik dan modal sosial yang memadai, kemudian konsisten juga dalam memperjuangkan segala hal aspirasi dari rakyat, melaksanakan fungsi representasi, selalu menyempatkan untuk hadir ditengah masyarakat ketika diperlukan, serta menjadi wakil rakyat yang bertanggungjawab di daerah pemilihannya.

2. Novita Damayanti, dan Radja Erland Hamzah “Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-Jk Pada Pemilihan Presiden 2014”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye politik pasangan Jokowi-JK capres-cawapres Pilpres 2014. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini: komunikasi politik, kampanye politik, debat politik dan pencitraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Metode pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen serta menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini. Strategi kampanye politik Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 adalah kerja nyata dengan rakyat. Implementasi kampanye yang dilakukan pada saat itu adalah blusukan, pesta rakyat, partisipasi masyarakat, dan kampanye rakyat. Slogan salam dua jadi serta kerja menjadi bagian dalam kampanye tersebut. Ikon kemeja kotak-kota dan kemeja putih menjadi simbol bagi pendukung Jokowi-JK.

3. Bella Putriwani. “Strategi Politik Incumbent Dan Faktor Penyebab kekalahan pada pemilihan legislatif 2019 kabupaten Bangka”

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi politik serta mengetahui faktor kekalahan incumbent pada pemilihan legislatif 2019 dan menggunakan teori strategi politik menurut Schroder yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ofensif dan defensive menurut Peter Schroder dalam penelitian ini tidak berlaku pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Bangka karena politisi masih belum terdapat pengelompokan bagian-bagian strategi yang khusus untuk digunakan pada pemilihan. Adapun faktor yang menjadi penyebab kekalahan yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja politisi, adanya perubahan perilaku masyarakat, internal partai yang terfrakmentasi, tim sukses yang tidak profesional dan kurang transparansi dari penyelenggara terhadap pemilu.

4. Indah Adi Putri. “Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat dalam Pemilu 2014”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi politik perempuan calon legislatif yang maju dalam Pemilu 2014 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh faktor budaya sistem kekerabatan matrilineal mempengaruhi proses politik dalam Pemilu 2014. Penelitian dilakukan terhadap 2 orang caleg petahana, dan satu orang caleg yang maju untuk pertamakali, tetapi berhasil meraih suara terbanyak diantara enam perempuan caleg terpilih. Metode penelitian adalah dengan

kualitatif studi kasus, data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi politik perempuan caleg adalah strategi ofensif perluasan pasar dan strategi defensif mempertahankan pasar. Jaringan kekerabatan matrilineal juga menjadi salah satu strategi politik bagi perempuan caleg.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto, Ratnia Solihah. Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024. 2023	Strategi dalam pemanfaatan modal politik dan modal sosial salah satu aktor politik untuk mempertahankan kekuasaan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Kedua modalitas ini menjadi suatu kekuatan yang wajib dimiliki oleh para aktor politik saat hendak bersaing dalam kontestasi	• Kualitatif	• Lokasi Penelitian

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		politik. Karena modalitas politik yang diusung oleh para aktor politik berupa modal politik dan modal sosial sangat efektif memenangkan kontestasi politik		
2.	Novita Damayanti, dan Radja Erland Hamzah. Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-Jk Pada Pemilihan Presiden 2014. 2017	Untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye politik pasangan Jokowi-JK capres-cawapres Pilpres 2014	• Kualitatif	• Lokasi Penelitian
3.	Bella Putriwani. Strategi Politik Incumbent Dan Faktor Penyebab kekalahan pada pemilihan legislatif 2019 kabupaten Bangka. 2021	untuk mengidentifikasi strategi politik serta mengetahui faktor kekalahan incumbent pada pemilihan legislatif 2019 dan menggunakan teori strategi politik menurut Schroder yaitu strategi ofensif	• Kualitatif	• Lokasi Penelitian

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dan strategi defensif.		
4.	Indah Adi Putri. Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat dalam Pemilu 2014. 2017	untuk melihat strategi politik perempuan calon legislatif yang maju dalam Pemilu 2014 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Barat dan melihat bagaimana pengaruh faktor budaya sistem kekerabatan matrilineal mempengaruhi proses politik dalam Pemilu 2014.	• Kualitatif	• Lokasi Penelitian

2.2 Aktor Politik

Suatu struktur politik mempunyai berbagai macam komponen dan unsur, di antaranya adalah elite, atau aktor politik. Aktor politik adalah orang atau individu yang berpengaruh dan dapat mempengaruhi orang disekitarnya, sedangkan elit politik adalah sekelompok aktor yang berpengaruh. Para aktor politik berusaha untuk mencapai hal ini dengan mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui sarana kelembagaan dan organisasi dan dengan memperoleh kekuasaan politik

institusional, baik eksekutif maupun legislatif, dalam kebijakan yang diterapkan Elit dan aktor politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan.

Dalam konteks penelitian ini, aktor politik yang menjadi fokus adalah caleg incumbent. Istilah "incumbent" merujuk kepada individu yang saat ini menjabat dalam sebuah jabatan atau posisi tertentu dan mencalonkan diri kembali untuk menduduki jabatan yang sama dalam pemilihan berikutnya.

Menurut (Brian McNair 2011), aktor politik adalah individu yang memiliki aspirasi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mencapai kekuasaan di berbagai lembaga politik, pemerintahan, atau majelis konstituen, dengan harapan bahwa kebijakan yang mereka usulkan dapat diimplementasikan ketika mereka memegang kekuasaan.

Sebagai caleg incumbent, aktor politik ini telah memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas legislatif dan mewakili kepentingan masyarakat di lembaga legislatif. Mereka dapat menggunakan rekam jejak mereka selama masa jabatan sebelumnya untuk memperkuat kampanye mereka dan meyakinkan pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih kembali. Pengalaman kerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi dan melakukan konstituen services juga dapat menjadi aset yang berharga dalam kampanye mereka.

Selain itu, sebagai aktor politik yang saat ini menjabat, caleg incumbent biasanya memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan dukungan politik. Mereka dapat memanfaatkan jaringan politik yang telah mereka bangun selama masa jabatan sebelumnya, dukungan partai politik, dan dana kampanye untuk meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, mereka

juga dapat menggunakan fasilitas publik dan program pemerintah untuk meningkatkan visibilitas dan popularitas mereka di mata pemilih. Analisis terhadap strategi dan tindakan yang dilakukan oleh caleg incumbent dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik lokal dan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan mereka dalam memenangkan pemilihan. Hal ini dapat membantu dalam memahami peran dan dampak dari keberadaan caleg incumbent dalam proses politik dan demokrasi.

Menurut (Warjio 2016) Aktor politik adalah individu yang memegang peran penting dalam dinamika sistem politik. Mereka didefinisikan sebagai mereka yang menduduki posisi berpengaruh atau memiliki peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik. Sebagai penjaga kekuasaan, aktor politik bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan jalannya pemerintahan serta kebijakan publik. Peran aktor politik dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mencakup kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan memimpin dengan teladan dan keberanian, mereka dapat menjadi pendorong perubahan positif dan pembangunan yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu, memiliki aktor politik yang berkualitas dan berintegritas sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan suatu bangsa (Zuhro, Siti 2009).

Sebagai elit politik, aktor politik menduduki posisi penting dalam lembaga pemerintahan, khususnya di badan legislatif. Di sisi lain, kelas masyarakat non-aktor merujuk pada sekelompok individu yang tidak menjabat dalam pemerintahan. Masyarakat non-aktor ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin agama

yang memiliki pengaruh dan otoritas di kalangan masyarakat, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam kebijakan pemerintahan. Aktor ini adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kekuasaan dalam sistem politik. Mereka sebagai penguasa memiliki wewenang besar untuk menggerakkan dan mengatur struktur serta fungsi sistem politik. Dalam praktiknya, para aktor atau penguasa mendominasi berbagai aspek kehidupan dalam sistem politik. Penetapan kebijakan pun sangat dipengaruhi oleh kelompok aktor politik tersebut (McNair, 2011).

Aktor politik adalah individu yang menarik perhatian masyarakat dalam ranah politik. Menurut Letser G. Seligman, proses penunjukan aktor politik berkaitan dengan beberapa aspek, seperti kekuasaan, legitimasi elit politik, representasi elit politik, dan hubungan antara penunjukan aktor politik dengan perubahan. Aktor politik yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat karena reputasi mereka yang positif cenderung lebih mudah untuk memobilisasi dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Karena citra mereka yang baik, mereka memiliki kepercayaan dan keunggulan dalam mempengaruhi opini publik serta memobilisasi massa untuk mendukung agenda politik mereka. Dalam banyak kasus, ketika aktor politik memiliki reputasi yang baik, mereka memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan dukungan luas dari berbagai segmen masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk meraih keberhasilan dalam kompetisi politik. Sebaliknya, aktor politik yang memiliki reputasi negatif atau dipandang kontroversial mungkin menghadapi hambatan dalam memobilisasi dukungan, karena kurangnya kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat. Oleh karena itu, citra publik yang positif dapat menjadi

aset berharga bagi aktor politik dalam upaya mereka untuk memperoleh dukungan politik dan mencapai tujuan mereka (Jasin, 2016).

2.3 Strategi Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata strategi berasal dari kata Yunani “*strategos*: yang diterjemahkan sebagai “*the art of the general*” Pengertian strategi sendiri berasal dari konsep militer , dimana terdapat sekelompok orang yang perlu dibimbing dan diarahkan. Pada masa awal industrialisasi, istilah strategi masih digunakan hanya dalam konotasi militer. Hanya dengan demikian diperlukan kepemimpinan di bidang ekonomi. Pemahaman tentang strategi terus berkembang hingga muncul strategi manajemen yang memudahkan manajemen dalam organisasi. Konsep strategi semakin berkembang hingga mencakup berbagai aspek masyarakat, termasuk politik. Di bidang politik juga terdapat tujuan untuk membimbing anggota kelompok masyarakat, partai politik, dan organisasi (Schorder, 2004).

Definisi strategi menjadi semakin canggih dan tidak hanya sesuai dengan kepentingan militer tetapi juga kepentingan ekonomi dan politik. Pengerahan ini membawa perbedaan strategi dan taktik. Menurut Carl von Clausewitz, taktik merupakan pelajaran tentang penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang dalam pertempuran. Militer adalah sarana untuk mencapai tujuan perang: kemenangan. Kemenangan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan akhir strategi ini: perdamaian. Semakin tinggi tingkat strategi, maka pada akhirnya akan menjadi kebijakan yang berkesinambungan hingga tidak ada perubahan (Arifin dan Ardial, 2010).

Menurut Firmanzah Strategi adalah suatu perencanaan yang memerlukan pemikiran mendalam dan tidak bisa dilakukan secara spontan. Ini merupakan gabungan dari seni dan ilmu yang mengutamakan pemanfaatan serta pengembangan berbagai kekuatan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam esensinya, strategi adalah perencanaan yang matang mengenai aktivitas yang saling terkait, diatur dengan cermat dalam hal waktu dan tujuan yang spesifik.

Strategi politik adalah strategi untuk mewujudkan cita-cita politik. Contohnya adalah penerbitan peraturan baru, deregulasi, dan pelaksanaan program privatisasi atau desentralisasi. Strategi politik seringkali digunakan dalam upaya merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama dalam pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi pemilu, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya dengan meraih hasil pemilu sebanyak-banyaknya. Tindakan yang tidak direncanakan secara hati-hati baik oleh partai maupun pemerintah menyebabkan proyek tersebut gagal dalam sebagian besar pelaksanaannya, menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat, dan kemudian mengabaikan peraturan tersebut, dan pemerintah juga mengakui adanya peraturan tersebut (Schorder, 2004).

Strategi politik tidak hanya mencakup partai politik dan pemerintah, tetapi juga organisasi non-pemerintah yang melakukan aktivitas politik. Semua organisasi ini memerlukan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Tanpa strategi politik, perubahan jangka panjang dan proyek berskala besar tidak dapat terwujud. Perencanaan strategis perubahan dan proses politik merupakan analisis yang jelas tentang situasi kekuasaan, gambaran yang jelas tentang tujuan akhir yang ingin

dicapai, dan pemusatan seluruh kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Schorder, 2004).

Halim (2014) berpendapat bahwa bagian dari strategi politik yaitu modal sosial aktual dan potensial yang dimiliki seseorang dilembagakan, bertahan dalam bentuk saling pengakuan dan kenalan (dengan kata lain keanggotaan dalam suatu kelompok sosial), dan memberikan berbagai peluang bagi para anggotanya. Peter Schroeder juga menjelaskan jenis-jenis strategi politik. Dimaknai sebagai strategi untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita, dan cita-cita tersebut ditujukan untuk memperoleh kekuasaan. Berikut adalah jenis strategi politik menurut Peter Schroeder.

1. Strategi ofensif (menyerang) biasanya digunakan ketika partai politik ingin menambah jumlah pemilih, keberhasilan suatu kampanye ditentukan ketika lebih banyak masyarakat yang mempunyai opini positif terhadap partai tersebut dibandingkan sebelumnya. Strategi penyerangan yang digunakan dalam kampanye pemilu juga harus mewakili perbedaan yang jelas dan menarik bagi masyarakat dan pendukung partai-partai yang bersaing.
2. Strategi defensif (bertahan) juga dapat digambarkan sebagai strategi yang dirancang untuk melindungi pasar dan menutup atau meninggalkan pasar untuk memastikan bahwa pangsa pasar bertahan dan tidak mengurangi pengaruhnya. Sebagai bagian dari strategi untuk melindungi pasar, partai-partai pro-pemerintah berusaha memaksa pemilih untuk tetap pada keputusan memilih mereka sambil mendorong pemilih musiman untuk memilih (partai politik atau kandidat). Pemasaran Politik merupakan strategi politik dengan menggunakan istilah pemasaran politik atau pemasaran politik. Kelompok atau rangkaian orang yang

digunakan untuk mempromosikan atau memasarkan gagasan, gagasan, ideologi, dan lain-lain calon politik, sifat politik pimpinan partai, dan program kerja/visi misi masyarakat. Contoh pemasaran politik di Indonesia antara lain kampanye Praktik pemasaran politik juga mempunyai potensi besar untuk berkembang menjadi bidang keilmuan, karena memerlukan metodologi yang kuat untuk mencapai tujuan yang efektif. Kelompok elit dibentuk berdasarkan latar belakang individu atau oleh individu-individu yang memahami nilai dan tujuan yang sama dan selalu menciptakan keutuhan dan persatuan (Hidajat, 2012).

4.4 Pemilu

Pemilihan umum adalah tahap di mana masyarakat memilih wakil-wakil yang akan menduduki posisi dalam pemerintahan. Proses ini merupakan salah satu penampakan nyata dari sistem demokrasi yang dianut oleh sebuah negara, dan juga merupakan implementasi praktis dari konsep demokrasi itu sendiri. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui partisipasi warga dalam menggunakan hak suara mereka saat pemilihan umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan panggung pertarungan yang penting dalam menentukan siapa yang akan mengisi jabatan-jabatan politik di dalam pemerintahan. Proses ini melibatkan partisipasi warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih para pemimpin mereka. Secara esensial, Pemilu adalah mekanisme di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka di dalam pemerintahan.

Selain definisi tersebut, dimensi lain tentang Pemilu, yaitu sebagai alat untuk

mengetahui aspirasi dan keinginan rakyat terkait arah dan kebijakan negara. Dengan kata lain, Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memberikan warga negara suatu wadah untuk mengekspresikan pandangan dan harapan mereka terhadap arah masa depan negara. Pelaksanaan Pemilu, dalam perspektif Morrisson, merupakan penafsiran konkret dari prinsip-prinsip demokrasi, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas rakyat.

Meskipun setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, Undang-Undang Pemilu menetapkan batasan usia bagi partisipasi dalam proses tersebut. Batas usia yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai pemilih adalah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum.

Prinsip kesetaraan usia 17 tahun mencerminkan perkembangan politik di Indonesia, mengakui bahwa warga negara yang mencapai usia ini telah menunjukkan kematangan politik yang memadai untuk bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, mereka berhak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Selain pembatasan usia, terdapat pula asas-asas yang menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pemilu. Asas-asas ini memegang peranan penting sebagai dasar dan tujuan utama dari pemilihan umum:

1. Asas Langsung: Ini berarti bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memilih langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa perantara.
2. Asas Umum: Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang

memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, atau status sosial lainnya.

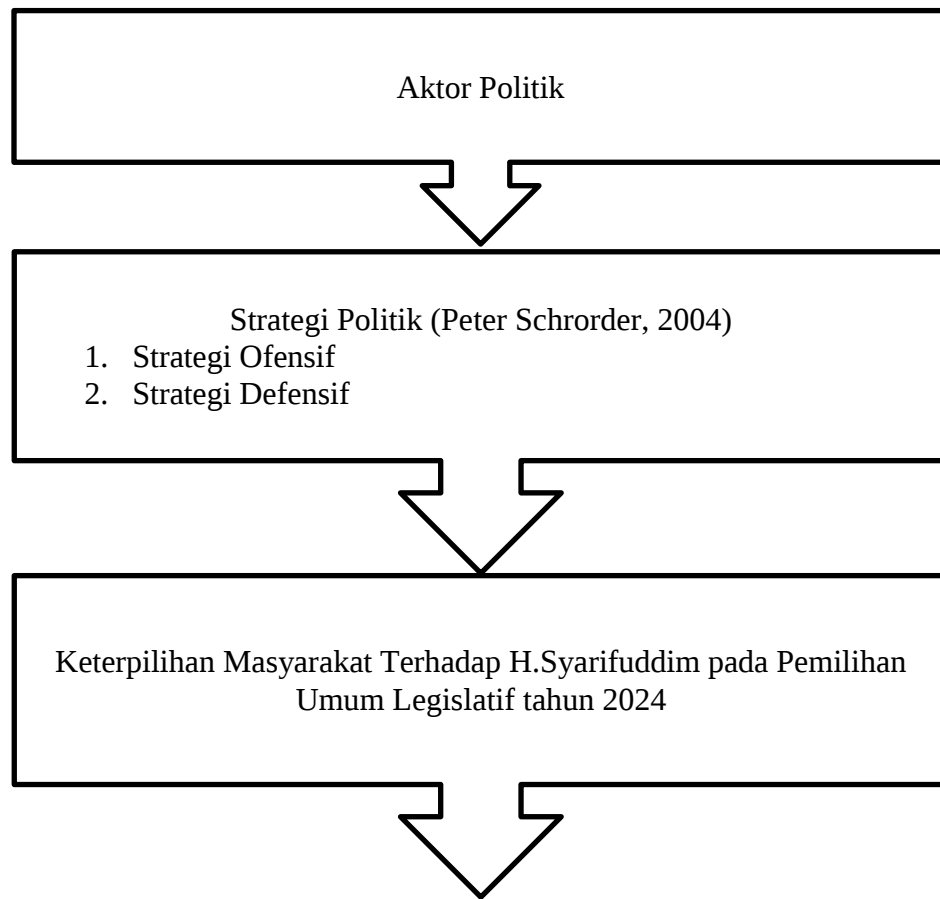
3. Asas Bebas: Ini menjamin bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihan mereka dalam pemilihan umum tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
4. Asas Rahasia: Pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya tanpa harus diketahui oleh orang lain, sehingga menjaga kerahasiaan pilihan mereka.
5. Asas Jujur: Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas Adil: Pelaksanaan pemilu harus memastikan bahwa setiap pemilih dan peserta pemilihan umum diperlakukan secara adil dan bebas dari kecurangan.

Tujuan dari pemilihan umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Sistem Ketatanegaraan yang Demokratis: Pemilu bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan.
2. Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Berintegritas: Proses pemilu harus dilaksanakan dengan keadilan dan integritas, tanpa adanya kecurangan atau manipulasi.
3. Menjamin Konsistensi Pengaturan Sistem Pemilu: Pemilu bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam pengaturan sistem pemilihan umum.

4. Memberikan Kepastian Hukum dan Mencegah Duplikasi dalam Pengaturan Pemilu: Tujuan pemilu adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya duplikasi atau ketidakjelasan dalam aturan pemilihan umum.
5. Mewujudkan Pemilu yang Efektif dan Efisien: Proses pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga mencapai hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat (UU No 7 tahun 17).

2.3 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Strategi Politik H.Syarifuddin Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 Di Provinsi Sulawesi Barat” maka dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Strategi yang dilakukan H.Syarifuddin dari Peter Schroder yaitu ofensif (menyerang) dan defensif (bertahan) berhasil membawa H.Syarifuddin duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat selama 2 periode. Masyarakat melihat kualitas dari H.Syarifuddin dari segi kedekatan beliau dengan masyarakat, sehingga meskipun H.Syarifuddin bukan anggota partai gerindra, hal tersebut tidak mempengaruhi elektabilitas H.Syarifuddin. Strategi yang dirancang melibatkan pelaksanaan kampanye melalui pembentukan tim sukses yang efektif serta penyusunan kebijakan-kebijakan konkret yang akan diterapkan jika terpilih menjadi anggota dewan. Setelah menduduki jabatannya, H.Syarifuddin berkomitmen untuk segera merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga pemilih dapat merasakan manfaat langsung dari janji-janji kampanye. Kepuasan masyarakat sebagai pemilih diharapkan akan meningkat, sehingga ketika pemilihan berikutnya diadakan, mereka akan kembali memilih H. Syarifuddin, mempercayakan masa depan mereka kepada kepemimpinannya yang terbukti konsisten dan dapat diandalkan.
2. Secara keseluruhan H.Syarifuddin tidak menghadapi kendala besar dalam

menjalankan strategi politiknya pada pemilihan legislatif tahun 2024. Namun, ada beberapa tantangan terkait komunikasi tim kampanye di beberapa daerah tertentu. Kendala ini terutama muncul dalam bentuk koordinasi yang kurang efektif dan penyampaian pesan yang tidak konsisten di antara tim kampanye lokal. Ketidaktepatan dalam komunikasi ini dapat menyebabkan beberapa pesan kampanye yang penting tidak tersampaikan dengan baik kepada pemilih, atau menimbulkan kebingungan mengenai kebijakan dan visi H.Syarifuddin. Meskipun tantangan ini tidak mengancam keseluruhan strategi politik, perbaikan komunikasi di tingkat lokal menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua anggota tim kampanye memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja secara harmonis untuk mendukung H. Syarifuddin. Dengan meningkatkan komunikasi internal dan memperkuat koordinasi antara tim kampanye pusat dan lokal, diharapkan pesan-pesan kampanye H. Syarifuddin dapat tersampaikan dengan lebih jelas dan efektif kepada masyarakat, sehingga mengoptimalkan dukungan pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2024.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada H. Syarifuddin, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat selama dua periode, disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan relasi dengan cakupan yang lebih luas, baik di daerah pemilihan maupun di daerah lainnya.

Mengingat pengalamannya yang sudah teruji, H. Syarifuddin dapat memanfaatkan jaringan yang telah dibangun selama dua periode tersebut untuk memperluas pengaruhnya. Meningkatkan komunikasi berarti tidak hanya sering berinteraksi dengan konstituen di daerah pemilihan, tetapi juga membuka jalur komunikasi yang lebih intens dengan pemimpin komunitas, tokoh masyarakat, dan pemilih di daerah lain. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan rutin, mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

2. Setiap anggota legislatif maupun calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi dewan memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan kedudukannya sebagai alat bantu bagi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, mereka diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Peran ini bukan hanya tentang memegang kekuasaan, tetapi juga tentang pelayanan publik yang efektif dan responsif. Partai politik juga memainkan peran krusial dalam proses pemilihan legislatif. Sebagai wadah yang menyediakan platform dan dukungan, partai politik membantu calon anggota legislatif dalam meraih kekuasaan. Visi dan misi partai politik yang diusung oleh calon menjadi faktor penting dalam menarik dukungan pemilih. Calon legislatif tidak hanya berjanji atas nama pribadi mereka, tetapi juga membawa visi dan misi partai yang mereka wakili, yang mencerminkan ideologi dan tujuan jangka panjang partai. Selain itu, anggota legislatif dan

calon anggota legislatif harus memastikan bahwa janji-janji kampanye mereka bukan hanya sekedar retorika, tetapi juga direalisasikan setelah terpilih. Mereka harus bekerja keras untuk mengubah visi dan misi serta kebijakan yang dijanjikan menjadi tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini memerlukan dedikasi, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- McNair, Brian. (2011). *An Introduction to Political Communication*. London and New York: Routledge.
- Halim. (2014). *Politik Lokal (Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya)*. Yogyakarta : Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B).
- Hidajat, I. (2012). *Teori-teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Ibrahim, dkk. (2018). *Metodologi Penelitian*. Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Jasin, Johan. (2016). *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta:CV. Budi utama.
- Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). *Applied Multivariate Statistical Analysis (6th ed.)*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Peter, S. (2004). *Politische Strategien. terj. Aviantie Agoesman*. Jakarta: FriedrichNauman-Siftung fuer die freiheit.
- Salam, Syamsir, Aripin.(2006). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Salim, Agus.(2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wancana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Peneleitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information (2nd ed.)*. Cheshire: Graphics Press.
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi)*. Jakarta: PT. Kencana.
- Zuhro, Siti. (2009). *Demokrasi Lokal: Peran aktor dalam Demokrasi*. Yogyakarta : Ombak.

Jurnal

- Afnan, D. (2017). Strategi Komunikasi Politik Tim Sukses Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Kuningan. *SOSFILKOM*, 9, 34.
- Albana, M. (2023). Pemilihan Umum (PEMILU) Sebagai Momentum Untuk Mengubah Nasib Rakyat. *Jurnal Multidisiplin West Science*. 2(8), 599-606.
- Ananda, R., & Valentin, T. R. (2021). Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp)*, 2(1), 169-185.
- Asfar, dkk. (2024). Mewujudkan Kepublikan Pemilu Dikalangan Pemuda dengan Mendorong Pemilih Muda sebagai Subjek Politik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8179-8186.
- Benni. (2019). Mekanisme Perekrutan Kader Partai Politik Lokal (Studi Di Banda Aceh). *At-Tasyri'*, 9(2), 103-118.
- Damayanti, N., & Hamzah, R. E. (2017). Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-Jk Pada Pemilihan Presiden 2014. *Wacana*, 16(2), 280-290.
- Febriansyah, dkk. (2018). Partai Politik Sebagai Political Brand. *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*. 21(1). 68-73.
- Firmansyah, J., & Faradhila, S. (2022). Modal Politik Kandidat Perempuan Dalam Pemilihan Umum Studi Kasus Dewi Noviany dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. *Jurnal Trias Politika*, 88-103.
- Heriyanto, A. A., & SolihaH., R. (2023). Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7(2), 366-374.
- Mukuan, F. E. (2020). Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Manado 2020. *Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*.
- Sutisna,A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 94-112.

Penerbitan pemerintah

Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 32 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*

<https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-gerindra-gerakan-indonesia-raya/>